







2026

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WhatsApp 0811-5428-883

dpmptspkabnunukan

Komplek kantor bupati
Jl. Sei Jepun-Mansapa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan telah berhasil menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini merupakan penjabaran operasional tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Nunukan periode 2025-2029, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

RENJA Tahun 2026 ini memuat rencana Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan, lengkap dengan target kinerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Fokus utama Sasaran RENJA, yaitu Meningkatnya Rencana Investasi Daerah, Terwujudnya Layanan Publik yang Prima, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RENJA 2026 sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama dari semua pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan sinergi yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Besar harapan kami, Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai visi Kabupaten Nunukan, yaitu **"Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri"**, serta secara spesifik mewujudkan pelayanan publik yang prima dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Nunukan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga segala upaya kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Nunukan, 3 November 2025
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NUNUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JUNI MARDIANSYAH, A.P
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19750601 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU **9**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capian Renstra SKPD 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN **19**

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **26**

BAB V PENUTUP **32**

DAFTAR TABEL

2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Tri Wulan I s/d III
DPMPTSP Tahun 2025.....11

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan 2024 Proyeksi Tahun 2025-2026 DPMPTSP 16

3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 DPMPTSP Kabupaten Nunukan.....21

4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja PD) DPMPTSP Tahun 2026.....27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, salah satunya melalui peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pembangunan, Urusan Penanaman Modal dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan dua tugas dan fungsi fundamental yang memiliki tuntutan sangat tinggi.

Penanaman Modal (investasi) adalah motor penggerak perekonomian yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Tuntutan pembangunan menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing agar mampu menarik investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance),* pelayanan publik dituntut untuk efisien, cepat, mudah, terjangkau, dan pasti. PTSP hadir sebagai jawaban atas tuntutan ini, yaitu menyatukan proses perizinan dan nonperizinan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu pintu. Keberadaan PTSP memastikan pelayanan terintegrasi dan memangkas birokrasi, yang secara langsung mendukung percepatan realisasi investasi dan peingkatan kualitas pelayanan publik.

Secara spesifik, dasar penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) didukung oleh landasan hukum yang kuat.

1. Aspek investasi dan kemudahan perizinan ini utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi ini menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan pelayanan serta perizinan, khususnya melalui implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Selain itu, pelaksanaan PTSP sebagai sistem pelayanan terintegrasi didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menegaskan bahwa PTSP adalah pelayanan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam kesatuan proses.

Dengan sinergi antara peningkatan investasi dan kemudahan pelayanan melalui PTSP, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan diarahkan untuk mencapai target pembangunan nasional dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disebut RENJA DPMPTSP adalah dokumen yang memuat gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DPMPTSP Kabupaten Nunukan. Adapun tahapan dalam penyusunan RENJA sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan periode tahun anggaran 2026, dan merupakan jabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 atau yang biasa disebut RENSTRA Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (RKPD) dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Nunukan mempunyai 6 Rencana Program Pelaksanaan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan RENJA DPMPTSP adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53620;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6618);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 61)
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifilasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 44);
25. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 29);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang penanaman

modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2026, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2026;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2026 dan prakiraan tahun 2027;
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2026;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026 menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sub Bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta penjelasan umum muatan setiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RENJA perangkat daerah serta capaian sasaran perangkat daerah pada tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menegaskan bahwa RENJA DPMPTSP Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan resmi yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dalam satu tahun anggaran, serta berfungsi sebagai acuan penyusunan RKA dan evaluasi capaian kinerja.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Agar mudah mengidentifikasikan tahun mana yang dimaksud dengan tahun lalu tahun berjalan, atau tiga tahun sebelum rencana, berikut ini diuraikan ilustrasi menggunakan angka tahun n.

Misalnya untuk Penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2026, maka :

Tahun n = Tahun yang direncanakan,yaitu tahun 2026

Tahun n-1 = Tahun berjalan,yaitu tahun 2025

Tahun n-2 = Tahun lalu,yaitu tahun 2024

Tahun n-3 = Dua tahun lalu, yaitu tahun 2023

Dari ilustrasi di atas maka review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu yang dimaksud adalah review terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada renja Tahun Anggaran 2024 (n-2), sedangkan perkiraan capaian tahun berjalan adalah perkiraan capaian kinerja pada tahun 2025 (n-1).

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang akan direview terhadap Renja Tahun 2025 antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut akan disajikan tabel realisasi fisik dan keuangan per-triwulan I s/d triwulan III (Januari-September) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2025.

TABEL 2.1

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TRI WULAN I S/D TRI WULAN III
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	BOBOT (%)	TARGET		REALISASI TARGET		TINGKAT CAPAIAN			SISA ANGGARAN (Rp)
								FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKA**	**Rp 5,801,137,351.00**	**92.84**	**100**	**Persen**	**48.00**	**Persen**	*25.00*	**Rp 4,125,597,678.00**	**71.12**	**Rp 1,675,539,673.00**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 2,277,990.00**	**0.04**	**6.00**	**Dokumen**	**6.00**	**Dokumen**	**130.00**	**Rp 2,277,990.00**	***100.00***	**Rp -**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Rp 773,520.00*	***0.01***	***5.00***	***Dokumen***	***4.00***	***Dokumen***	*80.00*	*Rp 773,520.00*	*100.00*	*Rp -*
	2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Rp 1,504,470.00*	***0.02***	***4.00***	***Laporan***	***2.00***	***Laporan***	*50.00*	*Rp 1,504,470.00*	*100.00*	*Rp -*
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 4,402,545,426.00**	**70.46**	**14.00**	**Bulan**	**11.00**	**Bulan**	78.57	**Rp 3,248,430,036.00**	73.79	**Rp 1,154,115,390.00**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Rp 4,402,545,426.00*	***70.46***	***14.00***	***Bulan***	***11.00***	***Bulan***	*78.57*	*Rp 3,248,430,036.00*	*73.79*	*Rp 1,154,115,390.00*
3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Rp 1,672,990.00**	**0.03**	**1.00**	**Dokumen**	**1.00**	**Dokumen**	**100.00**	**Rp 1,672,990.00**	100.00	**Rp -**
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	*Rp 1,672,990.00*	***0.03***	***1.00***	***Dokumen***	***1.00***	***Dokumen***	*100.00*	*Rp 1,672,990.00*	*100.00*	*Rp -*
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp -**	**0.00**	**1.00**	**Paket**	**0.00**	**Paket**	**0.00**	**Rp -**	#DIV/0!	**Rp -**
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Rp -*	***0.00***	***1.00***	***Paket***	***0.00***	***Paket***	*0.00*	*Rp -*	*#DIV/0!*	*Rp -*
5	**Administrasi Umum Prangkat Daerah**	**Rp 570,720,265.00**	**9.13**	**4.00**	**Laporan**	**4.00**	**Laporan**	**400.00**	**Rp 387,952,906.00**	67.98	**Rp 182,767,359.00**
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Rp 148,717,200.00*	***2.38***	***1.00***	***Paket***	***1.00***	***Paket***	***100.00***	*Rp 88,504,183.00*	*59.51*	*Rp 60,213,017.00*
	2 Penyediaan Bahan Logistik kantor	*Rp 63,042,065.00*	***1.01***	***1.00***	***Paket***	***1.00***	***Paket***	***100.00***	*Rp 35,702,137.00*	*56.63*	*Rp 27,339,928.00*

	3	*Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Rp*	*145,291,000.00*	***2.33***	***1.00***	***Laporan***	***1.00***	***Laporan***	***100.00***	*Rp*	*50,222,031.00*	*34.57*	*Rp*	*95,068,969.00*
	4	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*Rp*	*213,670,000.00*	***3.42***	***1.00***	***Dokumen***	***1.00***	***Dokumen***	***100.00***	*Rp*	*213,524,555.00*	*99.93*	*Rp*	*145,445.00*
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Rp**	**712,267,280.00**	**11.40**	**25.00**	**Laporan**	**19.00**	**Laporan**	**250.00**	**Rp**	**430,944,487.00**	60.50	**Rp**	**281,322,793.00**
	1	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Rp*	*145,800,000.00*	***2.33***	***12.00***	***Laporan***	***9.00***	***Laporan***	*75.00*	*Rp*	*54,595,097.00*	*37.45*	*Rp*	*91,204,903.00*
	2	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Rp*	*547,917,280.00*	***8.77***	***12.00***	***Laporan***	***9.00***	***Laporan***	*75.00*	*Rp*	*363,201,440.00*	*66.29*	*Rp*	*184,715,840.00*
	3	*Penyeediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Rp*	*18,550,000.00*	***0.30***	***1.00***	***Laporan***	***1.00***	***Laporan***	*100.00*	*Rp*	*13,147,950.00*	*70.88*	*Rp*	*5,402,050.00*
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Rp**	**111,653,400.00**	**1.79**	**10.00**	**Unit**	**7.00**	**Unit**	**166.67**	**Rp**	**54,319,269.00**	48.65	**Rp**	**57,334,131.00**
	1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Rp*	*74,653,400.00*	***1.19***	***9.00***	***Unit***	***6.00***	***Unit***	*66.67*	*Rp*	*17,863,000.00*	***23.93***	*Rp*	*56,790,400.00*
	2	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Rp*	*37,000,000.00*	***0.59***	***1.00***	***Unit***	***1.00***	***Unit***	*100.00*	*Rp*	*36,456,269.00*	***98.53***	*Rp*	*543,731.00*
II	***PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL***		***Rp***	***80,221,670.00***	***1.28***	***100***	***Persen***	***0.00***	***Persen***	*0.00*	***Rp***	***14,264,960.00***	**17.78**	***Rp***	***65,956,710.00***
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Rp**	**64,569,060.00**	**1.03**	**10.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Rp**	**13,211,050.00**	**20.46**	**Rp**	**51,358,010.00**
	1	*Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota*	*Rp*	*64,569,060.00*	***1.03***	***10.00***	***Dokumen***	***0.00***	***Dokumen***	*0.00*	*Rp*	*13,211,050.00*	*20.46*	*Rp*	*51,358,010.00*
2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Rp**	**15,652,610.00**	**0.25**	**2.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Dokumen**	**0.00**	**Rp**	**1,053,910.00**	6.73	**Rp**	**14,598,700.00**
	1	*Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)*	*Rp*	*15,652,610.00*	***0.25***	***2.00***	***Daerah***	***0.00***	***Daerah***	*0.00*	*Rp*	*1,053,910.00*	*6.73*	*Rp*	*14,598,700.00*
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Rp**	**32,382,820.00**	**0.52**	**100**	**Persen**	**0.00**	**Persen**	*0.00*	**Rp**	**-**	0.00	**Rp**	**32,382,820.00**
1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Rp**	**32,382,820.00**	**0.52**	**1.00**	**Kegiatan**	**0.00**	**Kegiatan**	**0.00**	**Rp**	**-**	0.00	**Rp**	**32,382,820.00**
	1	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota*	*Rp*	*32,382,820.00*	***0.52***	***1.00***	***Dokumen***	***0.00***	***Dokumen***	*0.00*	*Rp*	*-*	*0.00*	*Rp*	*32,382,820.00*

IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Rp**	**198,177,130.00**	**3.17**	**100**	**Nilai Baik**		**Nilai Baik**		**Rp**	**27,296,520.00**	13.77	**Rp**	**128,671,257.00**
1	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp**	**198,177,130.00**	**3.17**	**435.00**	**Pelaku usaha**	**457.00**	**Pelaku usaha**	**286.88**	**Rp**	**27,296,520.00**	13.77	**Rp**	**128,671,257.00**
	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	*Rp*	*53,730,260.00*	***0.86***	***200.00***	***Pelaku usaha***	***349.00***	***Pelaku usaha***	*174.50*	*Rp*	*8,444,290.00*	*15.72*	*Rp*	*45,285,970.00*
	2 Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	*Rp*	*25,479,080.00*	***0.41***	***50.00***	***Pelaku usaha***	***37.00***	***Pelaku usaha***	*74.00*	*Rp*	*18,852,230.00*	*98.00*	*Rp*	*6,626,850.00*
	3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Rp*	*118,967,790.00*	***1.90***	***185.00***	***Kegiatan Usaha***	***71.00***	***Kegiatan Usaha***	*38.38*	*Rp*	*42,209,353.00*	*35.48*	*Rp*	*76,758,437.00*
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Rp**	**25,253,830.00**	**0.40**	**100**	**Persen**	**8.00**	**Persen**	*8.00*	**Rp**	**16,060,019.00**	63.59	**Rp**	**9,193,811.00**
1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp**	**25,253,830.00**	**0.40**	**26.00**	**Dokumen**	**8.00**	**Dokumen**	**30.77**	**Rp**	**16,060,019.00**	63.59	**Rp**	**9,193,811.00**
	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Rp*	*25,253,830.00*	***0.40***	***26.00***	***Dokumen***	***8.00***	***Dokumen***	*30.77*	*Rp*	*16,060,019.00*	*63.59*	*Rp*	*9,193,811.00*
VI	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Rp	111,517,540.00	**1.78**	**100**	**Persen**	**25.00**	**Persen**	*25.00*	**Rp**	**6,680,000.00**	5.99	**Rp**	**104,837,540.00**
1	**Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Rp	111,517,540.00	**1.78**	**18.00**	**Kegiatan Usaha**	**25.00**	**Kegiatan Usaha**	**138.89**	**Rp**	**6,680,000.00**	5.99	**Rp**	**104,837,540.00**
	1 Pengawasan Penanaman Modal	*Rp*	*111,517,540.00*	***1.78***	***18.00***	***Kegiatan Usaha***	***25.00***	***Kegiatan Usaha***	*138.89*	*Rp*	*6,680,000.00*	*5.99*	*Rp*	*104,837,540.00*
J U M L A H		**Rp**	**6,248,690,341.00**	**100.00**	**RATA-RATA CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN**					**Rp**	**4,189,899,177.00**	*67.05*	**Rp**	**2,058,791,164.00**

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pemerintah dalam Peningkatan Daya Saing Investasi secara Nasional yang Implementasinya melalui DPMPTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara nasional.

DPMPTSP Kabupaten Nunukan akan mendorong upaya kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan Pengusaha Regional, Nasional, dan Internasional dalam upaya meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Perbaikan Realisasi Investasi, Iklim Investasi dan pengembangan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, DPMPTSP Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi Kebijakan Daerah dan Pelayanan di bidang Penanaman Modal serta Perizinan Usaha dan Perizinan Non Usaha secara terpadu dengan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Daerah di bidang pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan Penyelenggaraan PTSP;
2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan penyelenggaraan PTSP;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah:

1. Peningkatan layanan dan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik;
2. Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Pelaksanaan Perencanaan, Promosi, Kerja sama dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Pelaksanaan Perizinan Usaha melalui Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi serta Monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing
5. Memberikan kemudahan Pelayanan Perizinan melalui kegiatan Mobile Service,Jemput Bola dan One Day Service;
6. Melakukan Inovasi dan Kerja sama Investasi melalui Nunukan Investment Forum di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
7. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Nunukan.
8. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM);
9. Memberikan Reward dan Punishment bagi ASN yang berprestasi
10. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap Per triwulan.
12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan

Data Base berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023
Proyeksi Tahun 2024 dan 2025
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja	Target Renstra PD				RealisasiCapaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal (Milyar Rupiah)	1.249	1.311	1.377	1.514	1.850	4.619	2.499 On Progres s/d (TW 2)	1.514	Upaya yang dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan menjamin terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahandalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal melalui kerjasama antar kab/kota dan *stakeholders* terkait
No	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Target Renstra PD**				**RealisasiCapaian**			**Proyeksi**	**Catatan Analisis**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
1.1	Nilai Pertumbuhan Rencana Investasi Penanaman Modal	8%	10%	15%	18%	70.50 %	262,58%	5,70% On Progres s/d (TW 2)	18%	Untuk dapat mengurangi kendala yang dihadapi saat ini DPMPTSP terus melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis baik terkait peraturan pemberian fasilitas insentif daerah, dasar hukum maupun tentang tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkelanjutan yang melibatkan aparatur teknis terkait, pemerintah Kabupaten/Kota serta perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Nunukan.
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ataspelayanan perizinan	95	95	95	95	90,67	95,31	92,35 On Progres s/d (TW 2)	95	Sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja penerapan peraturan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko melalui OSS-RBA dan peringkat skala usaha kegiatan usaha di mana pengetahuan terkait dengan OSS-RBA oleh pengusaha di daerah serta OPD Teknis masih sangat terbatas. Selain itu, saat ini sistem OSS RBA antara Kementerian dan lembaga belum terintegrasi dengan baik.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Nunukan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi tahun 2025-2029 yakni "***Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, adil dan Mandiri".*** Kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Nunukan agar sesuai dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DPMPTSP, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum formal yang dimiliki. Bagi dunia usaha, DPMPTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha yang akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha.

Selain itu, Dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan produktif bagi pemerintah.

Permasalahan dan faktor Pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi antara lain:

1. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat diwilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di Perangkat Daerah lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan nonperizinan yang diperlukannya;

2. Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak;
3. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan;
4. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non perizinan

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, Aparatur DPMPTSP dituntut untuk berkompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan publik, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*, yaitu terbebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan transparan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Untuk mencapai dukungan tersebut, berbagai isu strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal, harus diidentifikasi dan diselesaikan, sehingga DPMPTSP dapat merumuskan strategi yang tepat dalam merealisasikan Visi Kepala Daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan. Sedangkan Sasaran mengambarkan hal-hal yang ingin dicapai dari suatu Tujuan melalui tindakan - tindakan terfokus yang bersifat rasional, spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Perumusan Tujuan dan Sasaran RENJA DPMPTSP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran target kinerja yang tercantum dalam Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan untuk periode 2025–2029, yaitu **"Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri"**. Adapun Misi yang ditetapkan dan merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi I yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter;
2. Misi II yaitu Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
3. Misi III yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas;
4. Misi IV yaitu Percepatan dan Pembangunan Infrastruktur dasar yang Adil dan Merata;
5. Misi V yaitu Menciptakan Tata Kehidupan yang Harmoni dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal;

Adapun RENJA DPMPTSP Tahun 2026 menjalankan Misi ke-2 dan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Nunukan. Fokus utama dari peran strategis ini diarahkan pada satu Tujuan, yaitu "**Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif".** untuk mencapai tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Nunukan berfokus pada tiga Sasaran yang saling mendukung, yaitu "**Meningkatnya Rencana Investasi Daerah, Terwujudnya Layanan Publik yang Prima, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah".** RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan tahun 2026 mencakup 6 program terdiri 14 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   g. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
   h. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
   b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
   a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
   a. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Rancangan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027, dengan sumber dana APBD Kabupaten Nunukan, disajikan pada Tabel 3.2 (T-C.33) berikut:

TABEL. 3.2 TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NUNUKAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER (APBD KAB/ APBD PROV)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
#	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah**			Rp 5.767.634.667,29	**APBD II**		Rp 5.767.634.667,29
1	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)**	**Kab. Nunukan**		**Rp 49.867.960**	APBD II		**Rp 60.310.786**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Kab. Nunukan	5 Dokumen	Rp 21.303.520	APBD II	5 Dokumen	Rp 28.107.864
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Nunukan	2 Laporan	Rp 3.564.440	APBD II	2 Laporan	Rp 4.702.922
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Kab. Nunukan	5 Dokumen	Rp 25.000.000	APBD II	5 Dokumen	Rp 27.500.000
2	**Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan adminstrasi keuangan**	**Kab. Nunukan**		**Rp 4.720.147.637**	APBD II		**Rp 4.066.512.971**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kab. Nunukan	32 Orang	Rp 4.720.147.637	APBD II	32 Orang	Rp 4.066.512.971

3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan adminisitrasi pengelolaan barang milik daerah**	Kab. Nunukan		**Rp 3.345.980,29**	APBD II		**Rp 440.000.000**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kab. Nunukan	**1 Laporan**	Rp 3.345.980,29	APBD II	**1 Laporan**	Rp 4.702.922
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Nunukan	**0**	**0**	APBD II	**0**	**0**
4	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan adminstrasi kepegawaian**	**Kab. Nunukan**		**Rp 301.996.000**	APBD II		**Rp 440.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab.Nunukan		0	APBD II	1 Paket	Rp 45.000.000
	Penddidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Nunukan	18 Orang	Rp 301.996.000	APBD II	25 Orang	Rp 350.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab.Nunukan		0	APBD II	3 Orang	Rp 45.000.000
5	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**Kab. Nunukan**		**Rp 445.343.170**	APBD II		**Rp 689.459.917**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Kab.Nunukan	4 Paket	Rp 133.378.000	APBD II	5 Paket	Rp 250.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab.Nunukan	5 Paket	Rp 110.157.170	APBD II	5 Paket	Rp 145.341.370
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Nunukan	18 Laporan	201.808.000	APBD II	20 Laporan	Rp 264.118.547
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Dokumen	Rp 30.000.000
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang mlik daerah yang berhasil diadakan**	**Kab. Nunukan**			APBD II		**Rp 185.000.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Unit	Rp 50.000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnnya yang disediakan	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Unit	Rp 75.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kanto atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Unit	Rp 60.000.000

7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**Kab. Nunukan**		**Rp 167.400.000**	**APBD II**		**Rp 305.000.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	Kab.Nunukan	12 laporan	Rp 139.200.000	APBD II	12 laporan	Rp 250.000.000
	Penyediaan Jasan Peralatan dan Perlekngkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DIsediakan	Kab.Nunukan	1 laporan	Rp 28.200.000	APBD II	1 laporan	Rp 55.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	Kab.Nunukan	0	0	0	0	0
8	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	**Kab. Nunukan**		**Rp 79.533.920**	**APBD II**		**Rp 104.937.054**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Kab.Nunukan	6 unit	Rp 79.533.920	APBD II	6 unit	Rp 104.937.054
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab.Nunukan	0	0	APBD II		0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab.Nunukan	0	0	APBD II		0
#	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi Total Terhadap Target Invstasi**	**Kab. Nunukan**		Rp 107.895.989	**APBD II**	**APBD II**	Rp 109.542.232
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten**	**Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (dokumen)**	**Kab. Nunukan**		**Rp 60.395.989**	**APBD II**	**10 Dokumen**	**Rp 51.581.633**
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Dokumen	Rp 31.000.000
	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab.Nunukan	10 Dokumen	Rp 60.395.989	APBD II	10 Dokumen	Rp 20.581.633
2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten**	**Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten (Dokumen)**	**Kab. Nunukan**		**Rp 47.500.000**	**APBD II**		**Rp 57.960.599**
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Dokumen	Rp 30.000.000
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab.Nunukan	2 Daerah	Rp 47.500.000	APBD II	0	0

	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Dokumen	Rp 27.960.599
#	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi**	**Kab. Nunukan**		Rp 104.747.932	**APBD II**	**26 Investor**	Rp 106.346.142
1	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah pameran investasi dan potensi daerah yang diikuti**	**Kab. Nunukan**		**Rp 104.747.932**	**APBD II**		**Rp 106.346.142**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab.Nunukan	0	0	APBD II	1 Dokumen	Rp 106.346.142
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab.Nunukan	1 Dokumen	Rp 104.747.932	APBD II	0	0
#	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	Kab.Nunukan		Rp 137.330.248	**APBD II**		Rp 139.425.590
1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan pengendalian penanaman modal**	**Kab. Nunukan**		**Rp 137.330.248**	APBD II		**Rp 139.425.590**
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab.Nunukan	11 Pelaku Usaha	Rp 22.284.961	APBD II	12 Pelaku Usaha	Rp 22.624.979
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab.Nunukan	30 Pelaku Usaha	Rp 67.673.698	APBD II	30 Pelaku Usaha	Rp 68.706.242
	Pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah di analisis dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha berusaha (kegiatan usaha)	Kab.Nunukan	20 Kegiatan Usaha	Rp 47.371.589	APBD II	22 Kegiatan Usaha	Rp 48.094.369
#	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal, pelaku usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan**	**Kab. Nunukan**		Rp 51.390.691	**APBD II**		Rp 52.174.794
1	**Pengelolaan data dan informasi perizinan da non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten**	**Jumlah pengelolaan data perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi**	**Kab. Nunukan**		**Rp 51.390.691**	**APBD II**		**Rp 52.174.794**

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Kab.Nunukan	100 Dokumen	Rp 51.390.691	APBD II	100 Dokumen	Rp 52.174.794
#	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**Kab. Nunukan**		Rp 398.150.000	**APBD II**		Rp 404.224.847
1	**Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan.**	**Kab. Nunukan**		**Rp 398.150.000**	**APBD II**		**Rp 404.224.847**
	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko teritegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintrgrasi secara elektronik.	Kab. Nunukan	225 Pelaku Usaha	Rp 150.000.000	APBD II	275 Pelaku Usaha	Rp 151.995.712
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko teringerasi secara elektronik	Kab. Nunukan	30 Pelaku Usaha	Rp 54.475.327	APBD II	40 Pelaku Usaha	Rp 56.558.750
	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Nunukan	1 Paket	Rp 193.674.673	APBD II	1 Paket	Rp 195.670.385

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2026

Bab ini menyajikan RENJA dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk tahun anggaran 2026. Secara spesifik, menjelaskan mengenai RENJA atau langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini secara detail merinci pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengintegrasikan perencanaan program, penentuan Target Kinerja, Alokasi Anggaran secara terukur dan akuntabel.

Rincian pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tebel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. NUNUKAN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						**7.468.063.734,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.468.063.734,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**7.468.063.734,00**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.206.430.305,70**						**-**	**0,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.867.960,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	21.303.520,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.564.440,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.791.008.135,70			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	4.791.008.135,70	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	301.996.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	301.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	445.343.170,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	133.378.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	110.157.170,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	201.808.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	563.681.120,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	139.200.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	28.200.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	396.281.120,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	79.533.920,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	79.533.920,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	-	-			-	**106.270.880,00**						-	**0,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	41.271.900,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	41.271.900,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	64.998.980,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				2 Daerah	64.998.980,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	-	-			-	**75.159.383,30**						-	**0,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	75.159.383,30			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	75.159.383,30	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-			-	**612.161.855,00**						-	**0,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	612.161.855,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	347.154.665,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	69.999.660,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				195 Kegiatan Usaha	195.007.530,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**409.562.400,00**						**-**	**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	409.562.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 Kegiatan Usaha.	142.305.040,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				18 Kegiatan Usaha	267.257.360,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**58.478.910,00**						**-**	**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	58.478.910,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	58.478.910,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	JUMLAH							**7.468.063.734,00**							**0,00**	

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2026 ini, maka dapat diketahui secara jelas Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan pada Tahun 2026 setelah dialokasikannya anggaran Kegiatan. Sebab, RENJA DPMPTSP adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang berisi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam satu tahun anggaran, serta berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu, RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil capaian kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

RENJA DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan dinas pada tahun mendatang berdasarkan RENSTRA Kabupaten Nunukan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nunukan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi RENJA ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi RENJA ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan RENSTRA yang telah dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan implementasi RENJA dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian Sasaran dan Target yang telah ditetapkan didalam RENJA yang dibuat.
3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholder* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari RENJA yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi RENJA ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan RENJA yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap RENJA untuk pencapaian Visi dan Misi Organisasi;
5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Nunukan wajib

melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset;

6. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, wajib melakukan monitoring dan mengkaji pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2026 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi RENJA setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil evaluasi RENJA kepada Kepala Dinas;
7. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset;
8. RENJA DPMPTSP Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Semoga RENJA ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir, yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan nonPerizinan melalui Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Nunukan serta menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan.

Nunukan, 3 November 2025
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NUNUKAN



JUNI MARDIANSYAH, A.P
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19750601 199412 1 001